



KomnasHAM

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2009



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat

Telp. 6221-3925230 Fax. 6221-3925227

www.komnasham.go.id



KOMNASHAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA





*Off
Pelayanan
Pelayanan
Pelayanan*

KomnashAM

LAPORAN

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2009**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat

Telp. 6221-3925230 Fax. 6221-3925227

www.komnasham.go.id



KOMNASHAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA



KATA PENGANTAR

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Dengan dikeluarkannya Inpres ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2009 berarti Komnas HAM telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun pertama dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2009-2013 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2009, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Komnas HAM untuk tahun 2009 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja 2009 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh pejabat dan staf Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Jakarta, Mei 2010

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sekretaris Jenderal



Sudibyo Triatmodjo
NIP. 180002021



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif.....	v
Bab I. Pendahuluan	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Aspek Strategik Organisasi.....	3
C. Struktur Organisasi	3
Bab II. Perencanaan Strategik Organisasi	5
A. Rencana Strategik.....	5
1. Pernyataan Visi	5
2. Pernyataan Misi.....	5
3. Tujuan dan Sasaran	6
B. Rencana Kinerja	7
Bab III. Akuntabilitas Kinerja.....	11
A. Pengukuran Kinerja	11
B. Analisis Pencapaian Sasaran	11
Bab IV. Penutup	25

Lampiran

- Formulir Rencana Strategis
- Formulir Rencana Kerja Tahunan
- Penetapan Kinerja
- Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran
- Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebelum menetapkan tujuan serta sasaran organisasi, setiap instansi terlebih dahulu menetapkan visi dan misi organisasi. Visi dan Misi Komnas HAM 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM.

Misi :

Sebagai penjabaran dari Visi 2013, Komnas HAM menetapkan sejumlah misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM dalam rangka penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan, dan pemanfaatan jejaring dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM;
- 2) Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata organisasi, dan sumber daya manusia;
- 3) Memperkuat posisi kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM melalui penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
- 4) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi;
- 5) Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial (*social justice*);
- 6) Memperkuat kesadaran aparaturnegara dan *civil society* atas pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM;
- 7) Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dengan para pemegang kepentingan (*stake-holder*) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Komnas HAM telah menetapkan tujuh tujuan strategis dan 26 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 5 (lima)

program. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, capaian kinerja Komnas HAM TA 2009 adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pengkajian dan Penelitian

Sepanjang TA 2009 telah dilakukan pengkajian dan penelitian instrumen internasional hak asasi manusia maupun peraturan perundang-undangan nasional dengan capaian 166,67% atau sebanyak 10 peraturan perundang-undangan yang berhasil dikaji dan diteliti.

2. Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan

Dalam rangka penyebarluasan wawasan tentang hak asasi manusia, Komnas HAM diberikan wewenang untuk melakukan fungsi pendidikan dan penyuluhan kepada publik. Pendidikan dan penyuluhan HAM yang telah dilakukan meliputi 30 tema sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Penyuluhan dengan tema:

- 1.1. Penyuluhan HAM kepada masyarakat melalui talkshow "Warung HAM Gizi untuk Rakyat" dengan tema: Privatisasi Air Menyengsarakan Rakyat.
- 1.2. Penyuluhan HAM kepada masyarakat melalui talkshow "Warung HAM Gizi untuk rakyat" dengan tema: Mencari Solusi Kontroversi Perda Tibum.
- 1.3. Penyuluhan HAM: Mewujudkan kedaulatan pangan sebagai bagian perlindungan dan penegakan HAM bagi masyarakat pedesaan di Mataram.

2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAM dengan perincian sebagai berikut:

- 2.1. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Panitia RANHAM Propinsi Papua Barat.
- 2.2. Pendidikan HAM Bagi Kalangan Pondok Pesantren Se-Kabupaten Bandung Barat.
- 2.3. Pelatihan Dasar dan Lanjutan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagi Panitia RANHAM Propinsi Papua Barat.
- 2.4. Pelatihan HAM Dasar (BHRT 2009).
- 2.5. Pelatihan Dasar dan Lanjutan HAM bagi Aparatur Penegak Hukum Propinsi Kalimantan Barat.

- 2.6. Pelatihan Dasar dan Lanjutan HAM bagi Aparatur Penegak Hukum Propinsi Sumatera Selatan.
 - 2.7. 2009 Summer Institute in International Humanitarian Law and Human Rights Asia Pacific Transnational Justice and Post Conflict Human Rights.
 - 2.8. Pelatihan HAM Bagi Penegak Hukum.
 - 2.9. Pendidikan HAM Bagi Penguatan kapasitas Panitia RANHAM Propinsi Jambi.
 - 2.10. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagi Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi Sulawesi Barat
 - 2.11. Pelatihan HAM Bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
 - 2.12. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Aparatur Pemerintahan.
 - 2.13. Pelatihan Jurnalistik Bagi Staf Komnas HAM
3. Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan
- 3.1. Workshop Pembuatan Film Hak-Hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).
 - 3.2. Pemenuhan Hak Politik bagi Kelompok Rentan di Pemilu 2009.
 - 3.3. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Warganegara.
 - 3.4. Diskusi Kelompok Terfokus Pemajuan HAM melalui Penyusunan Direktori HAM
 - 3.5. Diskusi Mengupas Buku HAM dalam Masyarakat Komunal.
 - 3.6. Workshop HAM bagi Komunitas Pegiat HAM DAS Citarum.
 - 3.7. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Sipil dan Politik bagi Penyandang Cacat.
 - 3.8. Workshop Tata Kelola dan Audit Teknologi Informasi pada Institut Negara.
 - 3.9. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat.
 - 3.10. Lokakarya Mewujudkan Sistem Pendidikan yang Bebas dari Pelanggaran HAM.

- 2.6. Pelatihan Dasar dan Lanjutan HAM bagi Aparatur Penegak Hukum Propinsi Sumatera Selatan.
 - 2.7. 2009 Summer Institute in International Humanitarian Law and Human Rights Asia Pacific Transnational Justice and Post Conflict Human Rights.
 - 2.8. Pelatihan HAM Bagi Penegak Hukum.
 - 2.9. Pendidikan HAM Bagi Penguatan kapasitas Panitia RANHAM Propinsi Jambi.
 - 2.10. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagi Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi Sulawesi Barat
 - 2.11. Pelatihan HAM Bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
 - 2.12. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Aparatur Pemerintahan.
 - 2.13. Pelatihan Jurnalistik Bagi Staf Komnas HAM
3. Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan
 - 3.1. Workshop Pembuatan Film Hak-Hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).
 - 3.2. Pemenuhan Hak Politik bagi Kelompok Rentan di Pemilu 2009.
 - 3.3. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Warganegara.
 - 3.4. Diskusi Kelompok Terfokus Pemajuan HAM melalui Penyusunan Direktori HAM
 - 3.5. Diskusi Mengupas Buku HAM dalam Masyarakat Komunal.
 - 3.6. Workshop HAM bagi Komunitas Pegiat HAM DAS Citarum.
 - 3.7. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Sipil dan Politik bagi Penyandang Cacat.
 - 3.8. Workshop Tata Kelola dan Audit Teknologi Informasi pada Institut Negara.
 - 3.9. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat.
 - 3.10. Lokakarya Mewujudkan Sistem Pendidikan yang Bebas dari Pelanggaran HAM.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Inpres 7 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa setiap pimpinan kementerian/lembaga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja instansi masing-masing yang sering disebut LAKIP. Laporan kinerja tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Kemenneg PAN, yang saat ini sebutannya telah berubah menjadi Kemenneg PAN dan Reformasi Birokrasi.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Komnas HAM telah menyusun LAKIP Komnas HAM 2009 sesuai dengan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Komnas HAM, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU 39/1999) tentang Hak Asasi Manusia, adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dengan ditetapkannya UU 39/1999, Komnas HAM mempunyai landasan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tujuan Komnas HAM, sebagaimana ditetapkan oleh UU 39/1999, adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional

HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;

- b. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;
- c. Melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. Penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia;
- b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;

- a. Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
- b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM;
- c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.

Selanjutnya, untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. Perdamaian kedua belah pihak;
- b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
- c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. Penyelesaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintahan untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

B. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI

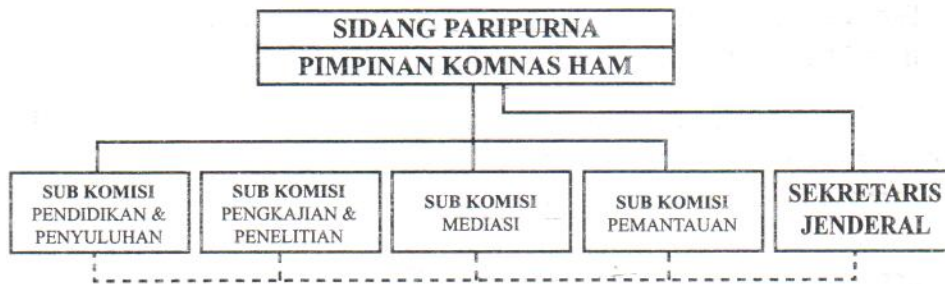
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Peran strategik yang dijalankan oleh Komnas HAM yaitu: Untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terpenuhinya perlindungan dan penegakan HAM bagi segenap martabat pribadi manusia, komunitas dan masyarakat Indonesia secara utuh dan menyeluruh (holistik), non diskriminasi, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan peran tersebut, maka Komnas HAM senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh dalam penciptaan situasi yang kondusif tersebut didedikasikan demi mengantarkan terwujudnya karakter manusia, masyarakat, dan bangsa yang selalu sadar, bertanggung jawab, dan menunjang nilai-nilai HAM dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

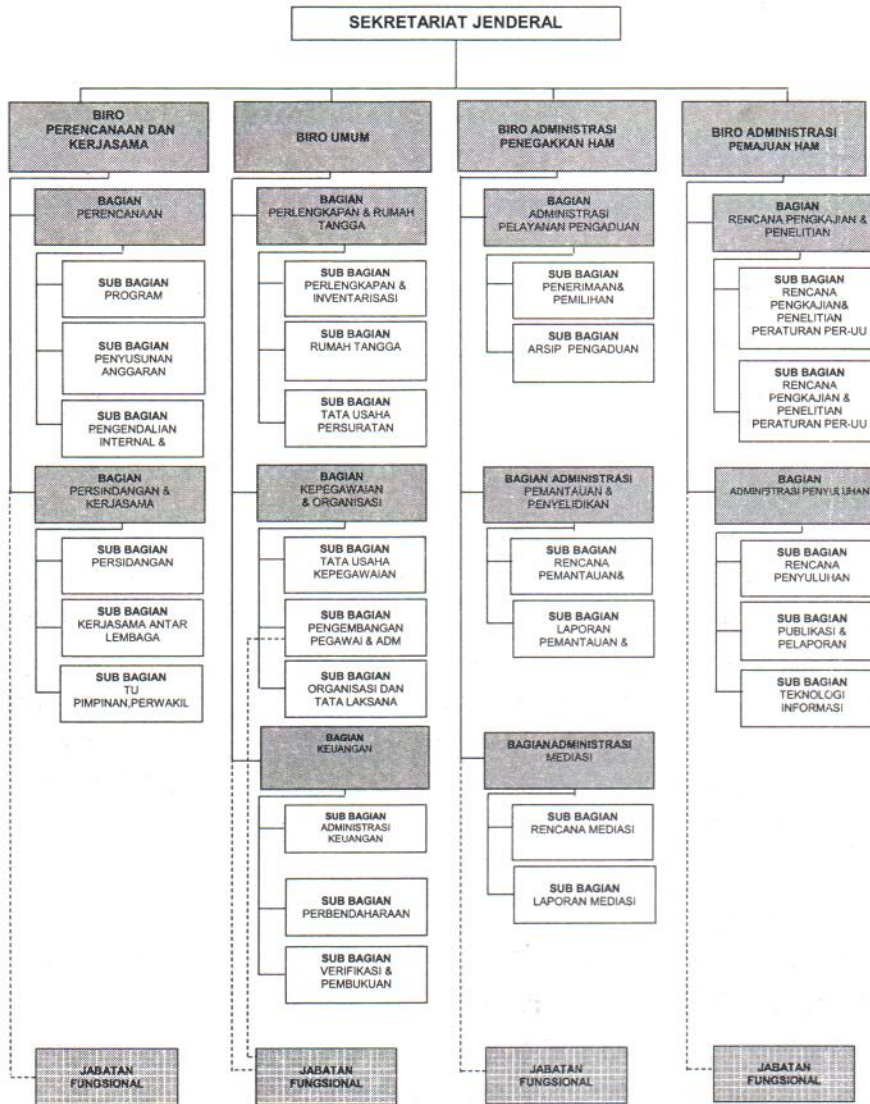
C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Komnas HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999



Sebagai pelaksanaannya, Sekretaris Jenderal Komnas HAM mengeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komnas HAM. Peraturan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Adapun visi dari Komnas HAM adalah;

Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM.

Motivasi utama dari keberadaan Komnas HAM untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terpenuhinya perlindungan dan penegakan HAM bagi segenap martabat pribadi manusia, komunitas dan masyarakat Indonesia secara utuh menyeluruh, non diskriminatif dan berkelanjutan. Penciptaan yang kondusif tersebut didedikasikan demi mengantarkan terwujudnya karakter manusia, masyarakat, dan bangsa yang selalu sadar, bertanggung jawab, dan menunjang nilai-nilai HAM dalam praktik kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Misi

Sebagai penjabaran dari Visi 2013, Komnas HAM menetapkan sejumlah misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM dalam rangka penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan, dan pemanfaatan jejaring dengan rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM;
2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata organisasi, dan sumber daya manusia;

3. Memperkuat posisi kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM melalui penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi;
5. Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial (*social justice*);
6. Memperkuat kesadaran aparaturnegara dan *civil society* atas pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM;
7. Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dengan para pemegang kepentingan (*stake-holder*) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia.

3. Tujuan & Sasaran

Sejak berdirinya pada tahun 1993 hingga awal Juni 2004 pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM dilaksanakan oleh Subkomisi yang dibentuk berdasarkan fungsi yaitu Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Subkomisi Penyuluhan, Subkomisi Pemantauan, dan Subkomisi Mediasi.

Tujuan strategis yang tercantum dalam Renstra Komnas HAM 2009-2013 :

1. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi Komnas HAM dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional;
2. Meningkatkan kinerja dan kewenangan lembaga penegak HAM;
3. Mengoptimalkan peran Komnas HAM dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi;
6. Meningkatkan kualitas SDM;
7. Memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM.

Sasaran Komnas HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik. Sasaran tersebut merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai oleh Komnas HAM selama 2009-2013. Berikut adalah perinciannya :

No	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM
2.	Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders
3.	Meningkatnya pelaksanaan –monitoring –dan evaluasi –putusan sidang paripurna
4.	Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara
5.	Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual
6.	Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi
7.	Meningkatnya kemampuan SDM
8.	Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/perwakilan
9.	Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM.

B. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja – disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program seperti yang telah tercantum dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga melalui kegiatan-kegiatan dalam satu tahun anggaran. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana kinerja terdiri dari dua dokumen yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK).

Berikut ini adalah Rencana Kinerja Komnas HAM TA 2009:

No	Sasaran	Indikator kinerja	target
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM	Jumlah draft peraturan perUUan tentang HAM yang dihasilkan	6 Draft

2.	Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders	Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	13 MoU
3.	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna	Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	16 Keputusan
4.	Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara	Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai jadwal	2 Laporan
		Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional	2 Keanggotaan
5.	Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Pemantauan & Penyelidikan	140 kasus
		Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Mediasi	60 kasus
		Jumlah SOP Pengaduan	1 Dokumen SOP Pengaduan
		Jumlah penerimaan kasus yang ditangani Sub Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan	5.000 Berkas pengaduan
6.	Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi	Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan	60 eksemplar
		Jumlah pengunjung perpustakaan	1000 Orang
		Jumlah laporan hasil ceramah/diskusi/seminar/sarasehan	37 Laporan
		Jumlah laporan hasil diklat HAM	50 Laporan
		Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM	12 Laporan
		Jumlah media yang berhasil dipublikasikan	200 Eksemplar
7.	Meningkatnya kemampuan SDM	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	44 Orang

8.	Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/ perwakilan	Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	2 Satker
9.	Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang memadai	244 Buah
		Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Keuangan	16 Laporan

Seperti yang telah tercantum dalam tabel di atas, Komnas HAM menetapkan 9 sasaran utama. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Komnas HAM sebagai institusi yang mengemban amanah dalam bidang pengkajian penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM menempatkan keempat tugas dan fungsi di atas sebagai prioritas kegiatan. Kemudian menyusul prioritas kegiatan lain sebagai pendukungnya. Yang berarti bahwa anggaran untuk keempat tugas dan fungsi di atas akan lebih diutamakan. Hal tersebut dapat dilihat dalam perincian di formulir Penetapan Kinerja (lampiran).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Untuk menilai tingkat pencapaian sasaran ditetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian. Indikator kinerja terdiri dari input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Dalam LAKIP Komnas HAM TA 2009 ini indikator yang dipakai hanya tiga yaitu input, output, dan outcome. Sedangkan indikator benefit dan impact belum dapat digunakan karena pengukuran dua indikator tersebut membutuhkan waktu yang panjang.

Indikator input, output, dan outcome dari setiap kegiatan digunakan dalam rangka mengukur pencapaian sasaran.

Sesuai dengan Rencana Kinerja, Komnas HAM melaksanakan 5 program dengan 22 kegiatan.

B. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN

SASARAN I : Meningkatkan kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM

Dalam Tahun Anggaran 2009, untuk mencapai sasaran tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu menghasilkan 6 draft peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti yang tertera dalam matrik di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatkan kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM	Jumlah draft peraturan perUUan tentang HAM yang dihasilkan	6 draft	10 draft	166,67%	

Dari enam target peraturan perUUan yang direncanakan akan dikaji dan diteliti, Komnas HAM telah memperoleh capaian atas sasaran yaitu 166,67%. Dalam bidang pengkajian dan penelitian, Komnas HAM telah berhasil

melakukan pengkajian dan penelitian terhadap 10 peraturan perUUan yang berperspektif HAM. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Hak Atas Pendidikan
2. Penelitian Hak Atas Kesehatan
3. Penelitian Hak Atas Anak
4. Penelitian Hak Atas Pekerja
5. Penelitian Pasar Tradisional
6. Penelitian terhadap Penyandang Cacat
7. Kajian Forum Eksternum (Kebebasan mendirikan rumah ibadah)
8. Kajian Optional Protokol (Protokol tambahan Hak Ekosob)
9. Kajian UU Pangan
10. Kajian UU 39/1999

Dalam pelaksanaannya di lapangan, Bagian Administrasi Pengkajian dan Penelitian tidak menemui adanya hambatan yang berarti dalam melakukan pengkajian dan penelitian atas peraturan perUUan. Namun kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2009 tersebut merupakan awal dalam pembuatan kebijakan sehingga masih harus ditindaklanjuti untuk penyempurnaannya.

Adapun rekomendasi atas tindak lanjut dari pencapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas adalah dengan menambah anggaran belanja Komnas HAM karena hasil kajian dan penelitian tersebut tidak akan berarti apabila tidak segera disahkan melalui mekanisme penetapan peraturan perUUan yang sah, sebagaimana peraturan perUUan yang lain. Tentunya proses untuk pengesahan peraturan perUUan tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Oleh karena itu diharapkan Kementerian Keuangan dan Komisi III DPR RI membuat kesepakatan bersama bahwa tugas dan fungsi Komnas HAM perlu didukung oleh berbagai pihak.

SASARAN II : Meningkatkan kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders

Dalam tahun anggaran 2009, Komnas HAM memiliki target menghasilkan 10 MoU dalam rangka perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM tetapi yang dapat terealisasi dalam tahun anggaran 2009 sebanyak 9 MoU yang terdiri dari institusi pemerintah, NGO dan PusHAM seperti terlihat dalam matrik berikut ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders	Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	9 MoU	<ul style="list-style-type: none">• Institusi pemerintah : 2 MoU• NGO dan PusHAM : 6 MoU	88,89%	

Sebagai perinciannya Komnas HAM telah menjalin kerjasama dengan sembilan institusi baik pemerintah maupun NGO dengan rincian: tiga dengan instansi pemerintah yaitu LPSK dan Komisi Yudisial. Sedangkan 6 MoU lainnya dengan NGO yaitu Human Rights Support Facilities (HRSF), Asia Pasific Forum (APF)/The Asia Pasific Forum of National Human Rights Institutions, The National Centre for Human Rights Jordan, Legal Development Facility (LDF) Australia, Norwegian Centre for Human Rights, dan Human Rights Foundation of Aotearoa New Zealand.

Dengan demikian dari total keseluruhan target/sasaran MoU sebanyak 10 MoU, terealisasi 9 MoU sehingga pencapaian sasarnya sebesar 88,89%.

Permasalahan dan kendala dalam mencapai sasaran II (meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders) adalah belum terjadinya sinkronisasi dan koordinasi antara program dan kegiatan Komnas HAM dengan instansi pemerintah, NGO dan PusHAM. Hal tersebut terjadi karena permasalahan dan prioritas program dan kegiatan instansi pemerintah, NGO dan PusHAM yang berbeda-beda.

Langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kerjasama antara Komnas dengan stakeholders adalah dengan mengoptimalkan kantor perwakilan Komnas HAM di enam (6) provinsi dalam upaya peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM dengan stakeholderkas di daerah. Untuk mewujudkan kerjasama tersebut, Komnas HAM mengharapkan adanya alokasi anggaran khusus untuk kantor perwakilan Komnas HAM di enam (6) provinsi. Karena sampai saat ini kantor perwakilan Komnas HAM di enam (6) provinsi yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Nanggro Aceh Darussalam, dan Papua belum memiliki alokasi anggaran untuk operasional kegiatan.

SASARAN III : Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna.

Dalam usaha melaksanakan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna dalam Tahun Anggaran 2009, Komnas HAM menargetkan 16 keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pelaksana. Persentase realisasi sasarnya dapat dilihat dalam matrik dibawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna	Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	16 keputusan	13 keputusan	81,25%	

Sidang paripurna Komnas HAM diselenggarakan sekurang-kurang satu kali dalam satu bulan. Sidang paripurna diselenggarakan antara Minggu I/ Minggu II pada setiap bulannya. Selain membahas hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM, dalam sidang paripurna juga dibahas isu-isu strategis yang berkenaan dengan intern kelembagaan Komnas HAM.

Berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM baik yang proyustisia maupun yang non proyustisia, apabila dipandang perlu, maka sidang paripurna akan mengeluarkan keputusan untuk pembentukan tim pelaksana

keputusan. Selama TA 2009 target pembentukan tim pelaksana sebanyak 16 tim pelaksana dengan realisasi sebanyak 13 tim pelaksana sehingga persentase pencapaiannya sebesar 81,25%.

Perincian tim pelaksana keputusan sidang paripurna TA 2009:

1. Tim Lapindo
2. Tim Kasus Kekerasan Polisi di Bengkalis
3. Tim RPP
4. Tim Munir
5. Tim Evaluasi Plt. Kabiro
6. Tim Aceh
7. Tim Dom Papua
8. Tim Penilaian Kinerja Perwakilan Komnas HAM Papua
9. Tim Pemilu
10. Tim Pekerja Migran
11. Tim Pengadaan CPNS
12. Tim Petrus
13. Tim 65

Sesuai dengan kebutuhan dan kasus pada tahun 2009, sidang paripurna membentuk 13 tim pelaksana keputusan. Sehingga target yang berjumlah 16 tidak terpenuhi.

SASARAN IV: Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara

Dalam Tahun Anggaran 2009, untuk capaian sasaran tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu menghasilkan sebagaimana tercantum dalam matrik di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara	Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai jadwal	2 laporan	2 laporan	100 %	
		Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme internasional HAM	2 Keanggotaan	2 Keanggotaan	100 %	

Komnas HAM bergabung dengan dua lembaga internasional yang bergerak dalam bidang HAM yaitu APF dan ICC. Sehubungan dengan keanggotaan tersebut, Komnas HAM mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia pada bulan April dan Juni. Serta kewajiban lain yang tidak kalah pentingnya, Komnas HAM juga berkewajiban untuk membayar iuran keanggotaan dalam APF dan ICC. Adapun besarnya adalah APF USD 3000/tahun (sekitar Rp 27.423.000,-/tahun), sedangkan untuk ICC sebesar 3.200 Euro/tahun (sekitar Rp 36.940.800/tahun).

Dalam pelaksanaan pembayaran dua keanggotaan tersebut Komnas HAM terpaksa harus menunggak karena pembayarannya dilakukan dalam bentuk dolar. Sementara kurs dolar yang tinggi tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Untukantisipasi pembayaran pada tahun anggaran selanjutnya Komnas HAM berupaya untuk mengalokasikannya sesuai dengan kurs dolar/ euro yang berlaku.

SASARAN V : Meningkatkan kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual

Dalam Tahun Anggaran 2009, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki sasaran meningkatkan kecepatan respon Komnas HAM dalam masalah-masalah aktual, seperti yang tercantum dalam matrik di bawah ini

:

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM dalam masalah-masalah aktual	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP	200 kasus	154 kasus	77%	

Dari matrik diatas dapat dilihat bahwa target indikator tercapai sebesar 77%. Capaian target kurang dari 80 % karena Bagian Administrasi pemantauan dan penyelidikan memiliki sumber daya manusia yang terbatas.

Komnas HAM mendapatkan pengaduan kasus sebanyak 5.819 berkas. Setelah dilakukan pemilahan terhadap kasus-kasus yang masuk, maka ada dua Bagian yang akan menanganinya yaitu Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan dan Bagian Administrasi Mediasi. dari kasus yang diadukan ke Komnas HAM, di bawah ini adalah perinciannya :

Kriteria pelanggaran HAM

No.	Jenis Hak	Jumlah
1.	Hak memperoleh keadilan	1.845
2.	Hak atas kesejahteraan	1.652
3.	Hak atas rasa aman	1.004

Komnas HAM tidak hanya secara pasif menerima pengaduan, tetapi secara aktif langsung terjun di lapangan apabila ditemukan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat.

Dari hasil penerimaan pengaduan dan keaktifan Komnas HAM dalam penanganan kasus, Bagian Admininstrasi Pemantauan dan Penyelidikan berhasil menangani 79 kasus. Sedangkan Bagian Administrasi Mediasi berhasil melakukan mediasi terhadap 75 kasus. Sehingga total kasus yang ditangani Komnas HAM sebanyak 154 kasus. Total pencapaian sasaran sebesar 77%.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM adalah terbatasnya mandat Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi selama ini, dalam kurun waktu 10 tahun. Dalam UU 39/1999 Komnas HAM hanya diberi mandat sampai dengan memberikan

rekomendasi atas kasus yang ada tanpa kewenangan untuk melakukan eksekusi yaitu penyidikan dan penuntutan kepada pelaku.

Solusi yang dapat disampaikan Komnas HAM untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pihak yang berwenang dalam hal ini Komisi III DPR RI segera membahas draft amandemen UU 39/1999 yang telah disusun Komnas HAM. Sehingga untuk tahun-tahun ke depan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mengemban tugas penanganan kasus pelanggaran HAM bisa melaksanakan tugasnya sampai paripurna.

SASARAN VI : Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi

Hak asasi manusia adalah hak mutlak seseorang yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak kelahirannya di dunia. Minimnya kesadaran HAM masyarakat merupakan tanggung jawab Komnas HAM untuk membuka kesadarannya. Di bawah ini adalah matrik capaian sasarnya:

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi	Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan	60 eksemplar	58 eksemplar	96,67%	-
		Jumlah pengunjung perpustakaan	1000 orang	1970 orang	197%	-
		Jumlah media informasi tentang ham	37 laporan	37 laporan	100%	-
			50 laporan	50 laporan	100%	-
			12 laporan	12 laporan	100%	-
76.000 eksemplar	10.700 eksemplar		14,08%	-		

Dalam pemajuan HAM, Komnas HAM menyelenggarakan penyuluhan dan penyebaran informasi melalui berbagai media. Komnas HAM menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, workshop, dan pendidikan pelatihan HAM kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. Institusi pendidikan yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas,

dan perguruan tinggi juga menjadi sasaran penyelenggaraan penyuluhan dan penyebaran informasi HAM.

Selain itu Komnas HAM juga menyelenggarakan perpustakaan di lantai 2 Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary no. 4B. Setiap orang yang berkeinginan untuk mengakses buku-buku tentang HAM bisa juga mengaksesnya melalui website Komnas HAM.

Berbagai media publikasi juga diselenggarakan oleh Komnas HAM, yang meliputi: Majalah SUAR yang terbit satu bulan sekali, Jurnal HAM yang dihasilkan satu kali dalam satu tahun serta Majalah Opini. Dari rencana/target pencetakan/penerbitan sebanyak 76.000 eksemplar, realisasinya hanya tercapai 10.700 eksemplar atau 14,08%. Adapun kendala dan hambatan yang selama ini terjadi:

- a. Keterbatasan SDM yang menangani *e-book* sehingga penyediaan fasilitas ini menjadi tidak maksimalnya untuk diakses pengunjung secara *online*.
- b. Ukuran file yang dijadikan *e-book* terlalu besar sehingga melebihi kapasitas server website.

Rekomendasi atau tindak lanjut dari permasalahan tersebut :

- a. Meningkatkan kemampuan SDM yang menangani *e-book* perpustakaan *online*.
- b. Memberikan pelatihan kepada beberapa staf agar dapat mengelola *content* perpustakaan *online*.
- c. Memperbesar ukuran parameter *upload* agar dapat menampung file *e-book* yang lebih besar.

SASARAN VII : Meningkatkan kemampuan SDM

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di lingkungan Komnas Sekretariat Jenderal Komnas HAM, maka diselenggarakan diklat, baik itu diklat fungsional, struktural maupun teknis. Di bawah ini adalah matrik pencapaian sarannya:

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Peningkatan kemampuan SDM	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	44 orang	25 Orang	56,82%	-

Penyelenggaraan diklat dilaksanakan dengan mengikuti jadwal badiklat/pusdiklat yang bekerjasama dengan Komnas HAM karena Komnas HAM belum memiliki badiklat/pusdiklat sendiri.

Dari matrik di atas, sasaran peningkatan kemampuan sumber daya manusia memiliki tiga macam kegiatan yaitu :

- a. Diklat struktural. Pada tahun 2009 Komnas HAM mengirimkan 9 orang pegawai untuk mengikuti diklat struktural. Diklat struktural diperuntukkan untuk pegawai yang akan menempati jabatan/posisi tertentu dalam organisasi. Realisasi diklat struktural sebesar 100% dari 9 orang yang direncanakan akan didiklatkan.
- b. Diklat teknis diperuntukkan untuk pegawai Komnas dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan dalam bidang keahliannya. Pada TA 2009 merencanakan sebanyak 20 orang pegawai yang akan didiklatkan, realisasinya 40% (8 orang).
- c. Diklat prajabatan diperuntukkan bagi pegawai Komnas HAM yang masih menempati posisi cpns untuk kemudian diangkat menjadi pns. Diklat ini ditujukan untuk membekali cpns dengan kemampuan dan pengetahuan dasar sehingga kelak dapat menjadi bekal bagi cpns yang bersangkutan. Realisasi peserta diklat prajabatan sebanyak 15 orang, realisasinya 53,33% (8 orang).

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran tersebut adalah masih minimnya alokasi anggaran untuk diklat sehingga sasaran yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal, hanya 56,82% saja.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kebutuhan mutlak yang harus di jalankan oleh setiap organisasi agar kinerja lembaga yang bersangkutan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tantangan zaman.

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah :

1. Perlu menyusun daftar prioritas kebutuhan diklat bagi seluruh pegawai.
2. Pembagian anggaran untuk pengembangan kapasitas pegawai lebih diprioritaskan.

SASARAN VIII : Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/ perwakilan

Komnas HAM berencana untuk membuka lagi beberapa kantor perwakilan di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, terutama provinsi yang mempunyai potensi konflik yang tinggi. Pada tahun 2009 Komnas HAM telah berhasil membentuk dua kantor sekretariat yaitu Kalimantan Barat dan Sumatera Barat sebagaimana tertera dalam matrik berikut ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Terbentuknya struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan baik pusat maupun daerah/ perwakilan	Jumlahsatker k o m n a s HAM yang terbentuk di provinsi	2 satker	2 satker	100 %	-

Berdasarkan matrik diatas, sasaran program dalam membentuk struktur kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan baik itu pusat maupun daerah/perwakilan dapat dipenuhi dengan tingkat pencapaian indikator yang sama yakni 100 %.

Hambatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas adalah dua satker yang terbentuk belum terdaftar penganggarannya di Direktorat Sistem Penganggaran, Departemen Keuangan (yang sekarang disebut Kementerian Keuangan). Kegiatan tersebut merupakan awal dari rencana menengah Komnas HAM karena Komnas HAM berupaya dalam membentuk satker di

enam (6) provinsi. Sedangkan rencana jangka panjang Komnas HAM yaitu membentuk kantor perwakilan di tiap-tiap provinsi di Indonesia.

Adapun rekomendasi atau tindak lanjut dari pencapaian sasaran tersebut adalah Komnas HAM merencanakan bahwa setiap provinsi di Indonesia memiliki kantor perwakilan agar penanganan pelanggaran hak asasi manusia dengan segera dapat direspon.

SASARAN IX : Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM

Sekretariat Jenderal Komnas HAM mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan penunjang dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM. Tugas yang diselenggarakan diantara menyelenggarakan kegiatan administratif dan penyediaan sarana dan prasarana.

Selain hal-hal di atas, Sekretariat Jenderal juga berkewajiban untuk menyelenggarakan perencanaan kegiatan maupun anggarannya. Di bawah ini disajikan matrik sebagai penjelasannya:

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang memadai	244 buah	200 buah	81,96 %	-
		Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Keuangan	16 laporan	10 laporan	100 %	
	3 dokumen					
	3 dokumen					

Dari matrik diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian indikator tersebut berbeda-beda. Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang memadai berhasil

mencapai target lebih besar dari angka 80 %. Hal ini dikarenakan telah dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan standar yang telah ditetapkan.

Jumlah laporan yang dihasilkan bagian Perencanaan dan Keuangan yang mencapai target indikator yang telah ditetapkan yaitu 10 laporan monitoring dan evaluasi, 3 dokumen perencanaan, dan 3 laoran keuangan.

Adapun kendala dan hambatan yang selama ini terjadi adalah masih terbatasnya sosialisasi Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Solusi dan rekomendasi yang selama ini dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah dengan melakukan sosialisasi atas Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

BAB IV PENUTUP

LAKIP ini disusun dengan tujuan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Hal tersebut adalah konsekuensi logis dari alokasi anggaran yang diperoleh setiap instansi yang mendapatkan anggaran dari APBN.

LAKIP Komnas HAM TA 2009 disajikan dalam tiga bab sesuai dengan SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Yang meliputi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja.

Semoga bermanfaat untuk bahan pengambilan keputusan Komnas HAM ke depan.

Rencana Strategik
Tahun 2009 - 2013

Formulir RS

Instansi/Unit Organisasi : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Visi : Terwujudnya Lembaga yang Mandiri dan Terpercaya dalam Perlindungan, Pemajuan, dan Penegakan HAM

Misi

1. Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM
2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata organisasi, dan sumber daya manusia
3. Memperkuat posisi kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM melalui penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya
4. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi
5. Mendukung terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial (social justice)
6. Memperkuat kesadaran aparaturnegara dan civil society atas pentingnya perlindungannya dan pemenuhan HAM
7. Mengembangkan dan mengaktifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dengan para pemegang kepentingan (stake-holders) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia

No.	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
	1	2	3	4	5	
1.	Meningkatkan partisipasi dan kontribusi Komnas HAM dalam pengembangan kebijakan di tingkat nasional	Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM	Jumlah draft peraturan perUuan tentang HAM yang dihasilkan	Meningkatnya partisipasi dan kontribusi Komnas HAM dalam penyusunan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional	Program Perencanaan Hukum	6
2.	Meningkatkan kinerja dan kewenangan lembaga penegak HAM	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah, lembaga/organisasi, dan individual yang bekerjasama dengan Komnas HAM	Jumlah instansi pemerintah, lembaga/organisasi, dan individual yang bekerjasama dengan Komnas HAM	Membangun kerjasama dengan penyelenggara negara dan jaringan organisasi serta individual	Program Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya	
3.	Mengoptimalkan peran Komnas HAM dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan Sidang Paripurna	Jumlah keputusan Sidang Paripurna yang ditindaklanjuti	Pembentukan tim pelaksana keputusan Sidang Paripurna	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	

No.	Tujuan	Uraian	Sasaran	Indikator	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Program	Ket
	1				2	3		
4.	Mengoptimalkan peran Komnas HAM dalam mewujudkan penghormatan, kemajuan dan penegakan HAM	Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara	Jumlah laporan kepada mekanisme HAM Internasional sesuai jadwal	Menghadiri konferensi/pertemuan tingkat internasional	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya			
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan kepada masyarakat	Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP	Menyediakan sistem pelayanan pengadaan yang quick response	Program Penegakan Hukum dan HAM			
6.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi	Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi	Jumlah referensi per pustakaan yang diadakan	Pengembangan per pustakaan dan dokumentasi	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya			
7.	Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya kemampuan SDM	Jumlah pengujung per pustakaan	Promosi per pustakaan	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya			
8.	Memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat	Pembentukan struktur organisasi kesefjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/perwakilan	Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	Pernambahan jumlah kantor perwakilan	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya			
9.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Jendral dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Meningkatkan peran Sekretariat Jendral dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang memadai	Pengadaan peralatan/perengkapan kantor	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik			
			Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Keuangan		Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM			

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2009

No.	SASARAN		TARGET	PROGRAM	URAIAN	KEGIATAN		SATUAN	TARGET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA				INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM	Jumlah draft peraturan perUuan tentang HAM yang dihasilkan	6 Draft	Program Perencanaan Hukum	Pengkajian/penelitian peraturan perundangan dari perspektif HAM, permasalahan HAM, dan instrumen HAM	Jumlah hasil kajian dan penelitian peraturan perUuan yang berperspektif HAM	Draft	6	
2.	Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders	Jumlah MOU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	9 MOU	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	Jumlah kerjasama dengan instansi pemerintahan	MOU	3	
3.	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna	Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	16 Keputusan	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	Penyelenggaraan kegiatan penyediaan pelanggaran HAM	Jumlah kerjasama dengan NGO dan PusHAM Jumlah putusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	Keputusan	16	
4.	Meningkatnya pematanaan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara	Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai jadwal	2 Laporan	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	Jumlah laporan hasil konferensi/pertemuan HAM yang dihadiri Komnas HAM	Laporan	2	
		Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional	2 Keanggotaan	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pembayaran iuran organisasi internasional	Jumlah keanggotaan tingkat internasional yang diikuti Komnas HAM	Keanggotaan	2	

No.	SASARAN			PROGRAM		KEGIATAN		SATUAN	TARGET			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
5.	Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP Bagian Administrasi Penantauan & Penyelidikan	200 Kasus	Program Penegakan Hukum dan HAM	KINERJA	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Penantauan & Penyelidikan	Kasus	140				
									Penyenggaraan Pengawasan/Pemantauan Pelaksanaan, Perlindungan, Pemajuan Penegakan HAM	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Penantauan & Penyelidikan	Kasus	60
									Program Penegakan Hukum dan HAM	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Penantauan & Penyelidikan	Kasus	60
6.	Peningkatan Penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi	Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan	60 eksemplar	Program Penegakan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	KINERJA	Jumlah buku yang telah dibeli	Eksemplar	60				
									Program Penegakan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan	Eksemplar	60
									Program Penegakan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan	Eksemplar	60
		Jumlah pengunjung perpustakaan	1000 Orang	Program Penegakan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	KINERJA	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	1000				
									Program Penegakan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	1000
									Program Penegakan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	1000

No.	SASARAN			PROGRAM	URAIAN	KEGIATAN		
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyelenggaraan/Sosialisasi/Diseminas/Seminar/Workshop/Publikasi	Jumlah laporan hasil ceramah/diskusi/seminar/sarasehan	Laporan	37
				Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAM	Jumlah laporan hasil diklat HAM	Laporan	50
				Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyuluhan & Penyebaran Informasi	Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM	Laporan	12
				Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penerbitan majalah/Jurnal	Jumlah media yang berhasil dipublikasikan	Eksemplar	76.000
				Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pengembangan Kapasitas/Administrasi/Manajemen SDM	Jumlah peserta diklat struktural	Orang	9
7.	Meningkatnya kemampuan SDM	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	44 Orang			Jumlah peserta diklat teknis	Orang	20
						Jumlah peserta diklat oralaabatan	Orang	15

No.	SASARAN				URAIAN	KEGIATAN		SATUAN	TARGET
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM		INDIKATOR	INDIKATOR		
8.	Pembentukan struktur organisasi kesekyenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/perwakilan	Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	2 Satker	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pelaksanaan Komitmen Indonesia Dalam Pemajuan HAM dan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	Satker	2	
9.	Meningkatkan peran Sekretariat Jenderat dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang memadai	244 Buah	Program Penerapan Keperintahan Yang Baik	Pengadaan Peralatan/Perengkapan kantor	Jumlah sarana dan prasarana layak yang tersedia	Buah	244	
		Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Keuangan	16 Laporan	Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Laporan	10	
						Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	3	
						Jumlah laporan keuangan	Dokumen	3	

FORMA PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2009

No.	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1.	Program Perencanaan Hukum	Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian lembaga HAM	Jumlah draft peraturan perundangan yang berperspektif HAM hasil kajian dan penelitian	6 Draft	Jumlah draft peraturan perundangan tentang HAM yang dihasilkan	6 Draft	2.004.718.000
2.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penggak Hukum Lainnya	Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders	Jumlah kerjasama dengan institusi pemerintah	4 MoU	Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	10 MoU	-
3.	Program Penerimaan Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang pengadilan	Jumlah putusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	16 keputusan	Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	13 keputusan	3.045.189.000
4.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penggak Hukum Lainnya	Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara	Jumlah laporan hasil konferensi/pertemuan HAM yang dihadiri Komnas HAM	2 Laporan	Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai label	2 Laporan	425.200.000
5.	Program Peningkatan Hukum dan HAM	Meningkatnya kecemasan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Pemertanian & Penyelidikan	140 Kasus	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP	140 Kasus	4.142.569.000
6.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penggak Hukum Lainnya	Peningkatan penyelebaran informasi	Jumlah buku yang telah dibeli	60 Kasus	Jumlah referensi perpustakaan yang disediakan	60 Eksemplar	173.450.000
			Jumlah pengunjungan perpustakaan	1.000 Orang	Jumlah referensi perpustakaan yang disediakan	60 Eksemplar	173.450.000
			Jumlah laporan hasil kegiatan/diskusi/seminar/sergahan	37 Laporan			2.437.653.000
			Jumlah laporan hasil diadak HAM	50 Laporan			1.714.825.000
			Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM	12 Laporan			731.535.000
			Jumlah media yang berhasil dipublikasikan	76.000 Eksemplar			640.754.000

No.	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
7.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Meningkatnya kemampuan SDM	Jumlah peserta diklat struktural	9 Orang	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	44 Orang	133.925,000
			Jumlah peserta diklat teknis	20 Orang			110.000,000
			Jumlah peserta diklat pelatihan	15 Orang			70.700,000
8.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pembentukan struktur organisasi kesekyenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/daerah	Jumlah sarana dan prasarana layak yang tersedia	2 Satek	Jumlah satek Kommas HAM yang terbentuk di provinsi	3 Satek	352.000,000
9.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kommas HAM	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	10 Laporan	Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang memadai	244 Buah	710.385,000
			Jumlah dokumen perencanaan	3 Laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Keuangan	16 Laporan	213.839,000
			Jumlah laporan keuangan	3 Laporan			1.624.021,000
							1.051.794,000

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2009

1 Sasaran	2 Indikator Sasaran	3 Rencana Tingkat Capaian (Target)	4 Realisasi	5 Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM	Jumlah draft peraturan tentang HAM yang dihasilkan	6 Draft	10 Draft	166,67%
Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders	Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	9 MoU	8 MoU	88,89%
Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna	Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	16 Keputusan	13 Keputusan	81,25%
Meningkatnya penerintahan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan dewanlembaga negara	Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai jadwal	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual	Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional	2 Keanggotaan	2 Keanggotaan	100,00%
Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebarluasan informasi	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP	200 Kasus	154 Kasus	77,00%
Peningkatan kemampuan SDM	Jumlah referensi perustataan yang diadakan	60 eksemplar	58 eksemplar	96,67%
Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/daerwaktulan	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	44 Orang	25 Orang	56,82%
Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	2 Satker	2 Satker	100,00%
Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang memadai	244 Buah	200 Buah	81,97%
	Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan	16 Laporan	16 Laporan	100,00%

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2009

PROGRAM	URAIAN	KEGIATAN			PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Perencanaan Hukum	Pengkajian/penelitian peraturan perundangan dari perspektif HAM, permasalahan HAM, dan instrumen HAM	Input: Dana Output: Jumlah draft peraturan perundangan yang berspektif HAM hasil kajian dan penelitian	Rp Draft	2,004,718,000 6	1,644,888,258 10	82.05% 166.67%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	Input: Dana Output: Jumlah kerjasama dengan institusi pemerintah	MOU	4	3	75.00%
Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	Penyelenggaraan kegiatan penyediaan pelannggaran HAM	Input: Dana Output: Jumlah putusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	MOU Keputusan	6 3,045,189,000 16	6 2,978,599,279 13	100.00% 97.81% 81.25%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	Input: Dana Output:	Rp	425,200,000	229,073,066	53.87%

PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KEGIATAN		PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
				RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pembayaran Iuran organisasi Internasional	Jumlah laporan hasil konferensi/pertemuan HAM yang dihadiri Komnas HAM Input:	Laporan	2	2	100,00%
		Dana Output: Jumlah keanggotaan tingkat Internasional yang diikuti Komnas HAM	Rp	29.100.000	25.000.000	85,91%
Program Penegakan Hukum dan HAM	Penyelenggaraan Pengawasan/Pemantauan Pelaksanaan, Perlindungan, Pemajuan Penegakan HAM	Dana Output: Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Pemantauan & Penyelidikan Input: Dana Output: Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Mediasi Input: Dana	Rp	4.142.569.000	3.792.159.410	91,54%
Program Penegakan Hukum dan HAM	Penyusunan Manual Pengaduan Online Komnas HAM	Dana Output: Jumlah SOP Pengaduan Input: Dana	Dokumen	1	1	100,00%
Program Penegakan Hukum dan HAM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima di Subbae pemerintahan pengadilan	Jumlah penerimaan kasus yang ditangani Sub Bagian Administrasi Pelayanan Pengadilan	Berkas	5.000	5.819	116,38%

PROGRAM	URAIAN	KEGIATAN				PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Peningkatan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Input:				
		Dana	Rp	173.450.000	124.366.384	71,70%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Peningkatan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Output:				
		Jumlah buku yang telah dibeli	Eksemplar	60	58	96,67%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyelenggaraan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Input:				
		Dana				
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyelenggaraan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Output:				
		Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	1.000	1970	197,00%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyelenggaraan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Input:				
		Dana	Rp	2.437.653.000	2.325.753.800	95,41%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyelenggaraan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Output:				
		Jumlah laporan hasil ceramah/diskusi/seminar/sarasehan	Laporan	37	37	100,00%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyelenggaraan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Input:				
		Dana	Rp	1.714.825.000	1.459.135.700	85,09%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyelenggaraan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Output:				
		Jumlah laporan hasil diklat HAM	Laporan	50	50	100,00%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyelenggaraan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Input:				
		Dana	Rp	731.535.000	495.892.300	67,79%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyelenggaraan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Output:				
		Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM	Laporan	12	12	100,00%

PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	KEGIATAN	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
						(7)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penerbitan majalah/jurnal	Input: Dana Output: Jumlah media yang berhasil dipublikasikan	Rp Esemplar	640,754,000 76,000	458,153,775 10,700	71,50% 14,08%	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pengembangan kapasitas/Administrasi/Manajemen SDM	Input: Dana Output: Jumlah peserta diklat struktural Input: Dana Output: Jumlah peserta diklat teknis Input: Dana Output: Jumlah peserta diklat prajabatan	Rp Rp Orang Rp Orang Rp Orang	133,925,000 110,000,000 20 70,700,000 15	99,365,000 61,980,000 8 61,420,000 8	74,19% 56,35% 40,00% 86,87% 53,33%	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pelaksanaan Komitmen Indonesia Dalam Pemajuan HAM dan Pembangunan Berkelanjutan	Input: Dana Output: Jumlah saliter Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	Rp Rp Sakler	352,000,000 2	351,400,000 2	99,83% 100,00%	
Program Penetapan Kacamata Yano Baik	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan kantor	Input: Dana Output: Jumlah sarana dan prasarana layak yang tersedia	Rp Rp Buah	710,385,000 244	650,018,895 200	91,50% 81,97%	
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan	Input: Dana	Rp	213,839,000	213,346,500	99,77%	

PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KEGIATAN		PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
				RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Ouput: Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Laporan	10	10	100,00%
		Input: Dana	Rp	245,773,000	245,489,800	99,88%
		Ouput: Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	3	3	100,00%
		Input: Dana	Rp	295,794,000	287,351,800	97,15%
		Ouput: Jumlah laporan keuangan	Dokumen	3	3	100,00%

